



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. D/01564/06/2016/63

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Kedutaan Besar, Perwakilan Tetap, Organisasi/Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya dan merujuk Nota Diplomatik Kementerian No.D/00713/03/2016/63 dan No.D/0001095/04/2016/63 perihal kebijakan Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara, wilayah khusus dan entitas, dengan hormat menyampaikan salinan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 yang mengatur tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu, syarat dan tujuan kedatangan orang asing yang mendapatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan, beserta terjemahan tidak resmi dalam versi Bahasa Inggris.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kedutaan Besar, Perwakilan Tetap, Organisasi/Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional lainnya.

Jakarta, 9 Juni 2016

Seluruh Kedutaan Besar, Perwakilan Tetap,
Organisasi/Badan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan
Organisasi Internasional lainnya
di

JAKARTA



No. D/01564/06/2016/63

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Diplomatic Missions, Permanent Representatives, United Nations/Specialized Agencies, and other International Organizations and with reference to the Ministry's Note No.D/00713/03/2016/63 and No.D/0001095/04/2016/63 regarding Visit Visa Exemption for foreign nationals of 169 countries, special regions and entities, has the honor to convey herewith a copy of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Regulation No.17 Year 2016 regulating Immigration Checkpoints, requirements and purpose of visit for foreign nationals with visit visa exemption facility, and its unofficial translation in the English version.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to all Diplomatic Missions, Permanent Representatives, United Nations/Specialized Agencies, and other International Organizations the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 9 June 2016

1

All Diplomatic Missions, Permanent Representatives,
United Nations/Specialized Agencies,
and other International Organizations
in

JAKARTA



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU, SYARAT,
DAN TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING
YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU,
SYARAT, DAN TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING
YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.

2. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Pasal 2

Orang Asing dari negara tertentu, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain; dan
- c. tidak termasuk dalam daftar penangkalan.

Pasal 3

Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan kegiatan dalam rangka:

- a. wisata;
- b. keluarga;
- c. sosial;
- d. seni dan budaya;
- e. tugas pemerintahan;
- f. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- g. mengikuti pameran internasional;

- h. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
- i. meneruskan perjalanan ke negara lain.

Pasal 4

Daftar TPI sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1475 Tahun 2015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 603

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU, SYARAT, DAN
TUJUAN KEDATANGAN BAGI ORANG ASING YANG MENDAPATKAN
BEBAS VISA KUNJUNGAN

DAFTAR TPI TERTENTU SEBAGAI TEMPAT MASUK DAN
KELUAR WILAYAH INDONESIA BAGI ORANG ASING
YANG MENDAPATKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN

A. TPI di Bandar Udara:

1. Adi Soemarmo, Surakarta;
2. Adi Sucipto, Yogyakarta;
3. Ahmad Yani, Semarang;
4. Bandara Internasional Lombok, Mataram;
5. Belitung, Tanjung Pandan;
6. Binaka, Sibolga;
7. El Tari, Kupang;
8. Frans Kaisiepo, Biak;
9. Halim Perdana Kusuma, DKI Jakarta;
10. Hang Nadim, Batam;
11. Husein Sastranegara, Bandung;
12. I Gusti Ngurah Rai, Bali;
13. Juanda, Surabaya;
14. Kualanamu, Medan;
15. Maimun Saleh, Sabang;
16. Minangkabau, Padang;
17. Mopah, Merauke;
18. Mozes Kilangin, Tembaga Pura;
19. Pattimura, Ambon;
20. Polonia, Medan;
21. Sam Ratulangi, Manado;
22. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan;
23. Soekarno Hatta, Banten;

24. Sultan Hasanuddin, Makassar;
25. Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
26. Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang;
27. Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru;
28. Supadio, Pontianak; dan
29. Tarakan, Tarakan;

B. TPI di Pelabuhan Laut:

1. Achmad Yani, Ternate;
2. Amamapare, Tembagapura;
3. Anggrek, Gorontalo;
4. Bagan Siapi-api, Bagan Siapi-api;
5. Bandar Bentan Telani Lagoi, Tanjung Uban;
6. Bandar Seri Udana Lobam, Tanjung Uban;
7. Bandar Sri Setia Raja, Bengkalis;
8. Batam Centre, Batam;
9. Batu Ampar, Batam;
10. Belakang Padang, Belakang Padang;
11. Belawan, Belawan;
12. Benete, Sumbawa Besar;
13. Biak, Biak;
14. Boom Baru, Palembang;
15. Celukan Bawang, Singaraja;
16. Citra Tri Tunas, Batam;
17. Ciwandan, Cilegon;
18. Dumai, Dumai;
19. Dwi Kora, Pontianak;
20. Gunung Sitoli, Sibolga;
21. Jambi, Jambi;
22. Jayapura, Jayapura;
23. Kabil, Batam;
24. Kendari, Kendari
25. Kota Baru, Kota Baru;
26. Kuala Enok, Tembilahan;
27. Kuala Langsa, Aceh;
28. Kuala Tanjung, Tanjung Balai Asahan;
29. Kuala Tungkal, Jambi;

30. Lauren Say, Maumere;
31. Lembar, Mataram;
32. Lhokseumawe, Lhokseumawe;
33. Malahayati, Aceh;
34. Malundung, Tarakan;
35. Manado, Manado;
36. Marina Teluk Senimba, Batam;
37. Marore, Tahuna;
38. Merauke, Merauke;
39. Miangas, Tahuna;
40. Nongsa Terminal Bahari, Batam;
41. Nusantara, Pare-pare;
42. Nusantara, Tahuna;
43. Padang Bai, Singaraja;
44. Panarukan, Panarukan;
45. Pangkal Balam, Pangkal Pinang;
46. Panjang, Bandar Lampung;
47. Pantoloan, Palu;
48. Pasuruan, Pasuruan;
49. Pemangkat, Sambas;
50. Probolinggo, Probolinggo;
51. Pulau Baai, Bengkulu;
52. Sabang, Aceh;
53. Samarinda, Samarinda;
54. Sampit, Sampit;
55. Samudera, Bitung;
56. Sekupang, Batam;
57. Slat Lampa, Ranai;
58. Semayang, Balikpapan;
59. Siak Sri Indrapura, Siak;
60. Sibolga, Sibolga;
61. Sintete, sambas;
62. Soekarno-Hatta, Makassar;
63. Sorong, Sorong;
64. Sri Bayintan, Tanjung Pinang;
65. Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang;
66. Sungai Guntung, Tembilahan;

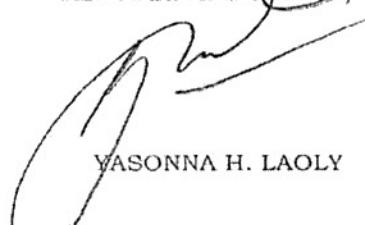
67. Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Karimun;
68. Benoa, Denpasar;
69. Tanjung Emas, Semarang;
70. Tanjung Gudang, Pangkal Pinang;
71. Tanjung Harapan, Selat Panjang;
72. Tanjung Intan, Cilacap;
73. Tanjung Kelian, Pangkal Pinang;
74. Tanjung Lontar, Kupang;
75. Tanjung Pandan, Bangka Belitung;
76. Tanjung Perak, Surabaya;
77. Tanjung Priok, DKI Jakarta;
78. Tanjung Uban, Tanjung Uban;
79. Tanjung Wangi, Jember;
80. Tarempa, Tarempa;
81. Teluk Bayur, Padang;
82. Teluk Nibung, Tanjung Balai Asahan;
83. Tembilahan, Tembilahan;
84. Tri Sakti, Banjarmasin;
85. Tual, Tual;
86. Tunon Taka, Nunukan;
87. Yos Sudarso, Ambon; dan
88. Yos Sudarso, Cirebon.

C. TPI di Pos Lintas Batas:

1. Aruk, Sambas;
2. Entikong, Entikong;
3. Metamauk, Atambua;
4. Mota'ain, Atambua;
5. Nanga Badau, Sanggau;
6. Napan, Atambua; dan
7. Skouw, Jayapura.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Unofficial Translation

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REGULATION NO. 17 YEAR 2016
ON
IMMIGRATION CHECKPOINTS (TPI), REQUIREMENTS, AND
PURPOSE OF VISIT FOR FOREIGNERS WITH VISIT VISA
EXEMPTION

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,
THE MINISTER OF AND LAW HUMAN RIGHTS,

Considering : that for the purpose of implementing the stipulations within Article 5 of Presidential Regulation No. 21 Year 2016 on Visit Visa Exemption, it has become necessary to establish a Minister of Law and Human Rights Regulation on Immigration Checkpoints,

Recalling :
1. Law No. 39 Year 2008 on State Ministries (Republic of Indonesia State Gazette Year 2008 No. 166, Supplement to the Republic of Indonesia State Gazette No. 4916)
2. Law No. 6 Year 2011 on Immigration (Republic of Indonesia State Gazette Year 2011 No. 52, Supplement to the Republic of Indonesia State Gazette No. 5216)
3. Government Regulation No. 31 Year 2013 on Implementing Regulation for Law No. 6 Year 2011 on Immigration (Republic of Indonesia State Gazette Year 2013 No. 68)
4. Presidential Regulation No. 44 Year 2015 on Ministry of Law and Human Rights (Republic of Indonesia State Gazette Year 2015 No. 84)
5. Presidential Regulation No. 21 Year 2016 on Visa Exemption (Republic of Indonesia State Gazette Year 2016 No. 44)
6. Minister of Law and Human Rights Regulation No. 29 Year 2015 on Organizational Structure and Work Procedures in the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights (Republic of Indonesia State Gazette Year 2015 No. 1473) as amended through Minister

of Law and Human Rights Regulation No. 6 Year 2016 on Amendment towards Minister of Law and Human Rights Regulation No. 29 Year 2015 on Organizational Structure and Work Procedures in the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights (Republic of Indonesia State Gazette Year 2016 No. 186)

HAS DECIDED TO:

Establish : MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATION ON IMMIGRATION CHECK-POINTS (TPI), REQUIREMENTS, AND PURPOSE OF VISIT FOR FOREIGNERS WITH VISA EXEMPTION

Article I

The following terms in this Minister Regulation can be taken to mean as follows:

1. Immigration Checkpoint (*Tempat Pemeriksaan Imigrasi*), from herewith abbreviated as TPI, consists of checkpoints in seaports, airports, cross-border posts, or other locations serving as entry and exit points to and from the Republic of Indonesia.
2. Republic of Indonesia Visa, herewith referred to as Visa, is a written statement issued by the proper authority under a Representative Office of the Republic of Indonesia or another office as established by the Government of Indonesia, containing approval for a Foreigner to undertake a visit to the Indonesian Territory and serves as the basis for issuing a stay permit.
3. Foreigners are persons who are not citizens of Indonesia.
4. Republic of Indonesia Territory, herewith referred to as Indonesian Territory, consists of all Territories in Indonesia and certain zones as established within Law No. 6 Year 2011 on Immigration.

Article 2

Foreigners from certain countries, special administrative local governments of certain countries, and certain entities exempted from the obligation to have a Visa to enter Indonesian Territory must fulfill the following requirements:

- a. carry the original copy of a valid passport which would be in effect for at least 6 (six) months;
- b. carry a return ticket or onward ticket to another country; and
- c. never have been blacklisted.

Article 3

Foreigners exempted from the obligation to have a visit Visa as stipulated in Article 2 may conduct activities for the following purposes:

- a. tourism purposes;
- b. family purposes;
- c. social purposes;
- d. art and culture purposes;
- e. government assignments;
- f. giving speeches or attending seminars;
- g. attending international exhibitions;
- h. attending meetings held with a central or representative office in Indonesia; and
- i. continuing travel to another country.

Article 4

The list of TPI as entry and exit points to and from Indonesian Territory for Foreigners as stipulated in Article 2 can be found in the Appendix as an inseparable part of this Minister Regulation.

Article 6

This Minister Regulation shall be in effect from the date of its promulgation.

In order for this to be known to all, the order is given to promulgate this Law by insertion in the Republic of Indonesia State Gazette.

Ratified in Jakarta
on 18 April 2016

MINISTER OF LAW AND
HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA

[signature]

YASONNA LAOLY

Promulgated in Jakarta
on 20 April 2016

DIRECTOR-GENERAL OF
LAWS AND REGULATIONS
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

[signature]

WIDODO EKATJAHJANA

REPUBLIC OF INDONESIA STATE GAZETTE YEAR 2016 NO. 603

APPENDIX TO
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTER OF LAW AND HUMAN
RIGHTS REGULATION
NO. 17 YEAR 2016
ON
IMMIGRATION CHECKPOINTS (TPI), REQUIREMENTS, AND
PURPOSE OF VISIT FOR FOREIGNERS WITH VISA EXEMPTION

LIST OF CERTAIN IMMIGRATION CHECKPOINTS (TPI) WHICH
ACT AS ENTRY AND EXIT POINTS FOR FOREIGNERS WITH
VISA EXEMPTIONS

A. TPI in Airports:

1. Adi Soemarmo, Surakarta;
2. Adi Sucipto, Yogyakarta;
3. Ahmad Yani, Semarang;
4. Lombok International Airport, Mataram;
5. Belitung, Tanjung Pandan;
6. Banaka, Sibolga;
7. El Tari, Kupang;
8. Frans Kaisiepo, Biak;
9. Halim Perdama Kusuma, DKI Jakarta;
10. Hang Nadim, Batam;
11. Husein Sastranegara, Bandung;
12. I Gusti Ngurah Rai, Bali;
13. Juanda, Surabaya;
14. Kualanamu, Medan;
15. Maimun Saleh, Sabang;
16. Minangkabau, Padang;
17. Mopah, Merauke;
18. Mozes Kilangin, Tembaga Pura;
19. Pattimura, Ambon;
20. Polonia, Medan;
21. Sam Ratulangi, Manado;
22. Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan;
23. Sockarno Hatta, Banten;
24. Sultan Hasanuddin, Makassar;
25. Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;
26. Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang;
27. Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru;
28. Supadio, Pontianak; and
29. Tarakan, Tarakan;

B. TPI in Seaports:

1. Achmad Yani, Ternate;

2. Amamapare, Tembagapura;
3. Anggrek, Gorontalo;
4. Bagan Siapi-api, Bagan Siapi-api;
5. Port Bentan Telani Lagoi, Tanjung Uban;
6. Port Seri Udana Lobam, Tanjung Uban;
7. Port Sri Setia Raja, Bengkalis;
8. Batam Centre, Batam;
9. Batu Ampar, Batam;
10. Belakang Padang, Belakang Padang;
11. Belawan, Bclawan;
12. Benete, Sumbawa Besar;
13. Biak, Biak;
14. Boom Baru, Palembang;
15. Celukan Bawang, Singaraja;
16. Citra Tri Tunas, Batam;
17. Ciwandan, Cilegon;
18. Dumai, Dumai;
19. Dwi Kora, Pontianak;
20. Gunung Sitoli, Sibolga;
21. Jambi, Jambi;
22. Jayapura, Jayapura;
23. Kabil, Batam;
24. Kendari, Kendari;
25. Kota Baru, Kota Baru;
26. Kuala Enok, Tembilahan;
27. Kuala Langsa, Aceh;
28. Kuala Tanjung, Tanjung Balai Asahan;
29. Kuala Tungkal, Jambi;
30. Lauren Say, Maumere;
31. Lembar, Mataram;
32. Lhokseumawe, Lhokseumawe;
33. Malahayati, Aceh;
34. Malundung, Tarakan;
35. Manado, Manado;
36. Marina Teluk Senimba, Batam;
37. Marore, Tahuna;
38. Merauke, Merauke;
39. Miangas, Tahuna;
40. Nongsa Terminal Bahari, Batam;
41. Nusantara, Pare-pare;
42. Nusantara, Tahuna;
43. Padang Bai, Singaraja;
44. Panarukan, Panarukan;
45. Pangkal Balam, Pangkal Pinang;

46. Panjang, Bandar Lampung;
47. Pantoloan, Palu;
48. Pasuruan, Pasuruan;
49. Pemangkat, Sambas;
50. Probolinggo, Probolinggo;
51. Pulau Baai, Bengkulu;
52. Sabang, Aceh;
53. Samarinda, Samarinda;
54. Sampit, Sampit;
55. Samudera, Bitung;
56. Sekupang, Batam;
57. Selat Lampa, Ranai;
58. Semayang, Balikpapan;
59. Siak Sri Indrapura, Siak;
60. Sibolga, Sibolga;
61. Sintete, Sambas;
62. Soekarno-Hatta, Makassar;
63. Sorong, Sorong;
64. Sri Bayintan, Tanjung Pinang;
65. Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang;
66. Sungai Tuntung, Tembilahan;
67. Tanjung Balai Karimun, Tanjung Balai Karimun;
68. Benoa, Denpasar;
69. Tanjung Emas, Semarang;
70. Tanjung Gudang, Pangkal Pinang;
71. Tanjung Harapan, Selat Panjang;
72. Tanjung Intan, Cilacap;
73. Tanjung Kelian, Pangkal Pinang;
74. Tanjung Lontar, Kupang;
75. Tanjung Pandan, Bangka Belitung;
76. Tanjung Perak, Surabaya;
77. Tanjung Priok, DKI Jakarta;
78. Tanjung Uban, Tanjung Uban;
79. Tanjung Wangi, Jember;
80. Tarempa, Tarempa;
81. Teluk Bayur, Padang;
82. Teluk Nibung, Tanjung Balai Asahan;
83. Tembilahan, Tembilahan;
84. Tri Sakti, Banjarmasin;
85. Tual, Tual;
86. Tunon Taka, Nunukan;
87. Yos Sudarso, Ambon; and
88. Yos Sudarso, Cirebon.

C. TPI in Cross-Border Posts

1. Aruk, Sambas;
2. Entikong, Entikong;
3. Metamauk, Atambua;
4. Mota'ain, Atambua;
5. Nanga Badau, Sanggau;
6. Napan, Atambua; and
7. Skouw, Jayapura

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA

[signature]

YASONNA LAOLY